

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Amir Abadi Jusuf, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Perusahaan Pailit*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004)

Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002)

Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

Aria Suyudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta: PSHK, 2004)

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Sinar Grafika 2019)

Elyta Ras Ginting, *Rapat-Rapat Kreditor*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Fred BG Tumbuan, *Pembagian Kewenangan Kurator dan Organ Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004)

Gunawan Widjaja, *et. al*, *“Jaminan Fidusia”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

- H. Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- H. Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2006)
- Ismail Rumadan, *et. al*, *Interpretasi Tentang Makna Utang Jatuh Tempo Dalam Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2002)
- Jerr Hoff, *Indonesian Bankruptcy Law*, (Jakarta: Tatanusa, 1999)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2008)
- Louis Edward Levinthal, *The Early History of Bankruptcy Law*, (Kessinger's Legacy Reprints, 1918)
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989)
- Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media Yogyakarta, 2000)

Rudhy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)

Soedeson Tandra, *Hukum Kepailitan Kertas Kerja Kurator dan Pengurus*, (Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2022)

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003)

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018)

Tafrizal Hasan Gwang, *Panduan Singkat Praktek Kurator*, (Tanggerang: THG Yustisia, 2005)

Taqiyuddin Kadir, *Gugatan Derivatif Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

#### **Hasil Penelitian :**

Dewi Tuti Muryati, "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersan Harta Pailit Dalam Kaitannya Dengan Hak Kreditor Separatis". Jurnal, Semarang: Program Studi Fakultas Hukum Universitas Semarang

Farlianto, “Akuisisi Sebagai Strategi Pengembangan Perusahaan”. Jurnal, Riau: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010

Jannati T, Zulkarnain Basir, *et. al*, “Pengaruh Kebijakan Akuisisi Terhadap Strategi Pelunasan Hutang Perusahaan Properti Pada Bursa Efek Indonesia (BEI)”. Jurnal, Jakarta: Imiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)

Ranto Parulian Simanjuntak, “Pemidanaan Terhadap Kurator dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari Aspek Keadilan Yang Bermartabat”. Disertasi, Jakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2023

Tri Reni Novita, “Analisis Model Kewenangan Kurator Dalam Mengurus dan Membereskan Harta Pailit Debitor”. Jurnal, Medan: Prosiding Seminar Nasional & Expo Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

**Website/Internet :**

Henry Campbell Black, M. A., “Black's Law Dictionary: *Definitions of the Terms  
and Phrases of American and English Jurisprudence*, Ancient and Modern,  
Fifth Edition ST. Paul Minn., West Publishing Co.1979, dalam: Maruli  
Simalango, Asas Kelangsungan Usaha (*Going Concern*) Dalam Hukum  
Kepailitan Indonesia”.

[https://media.neliti.com/media/publications/164468-ID-inkonsistensi-  
persyaratan-permohonan- pai.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/164468-ID-inkonsistensi-persyaratan-permohonan-pai.pdf), diakses pada 27 Agustus 2023

Kementerian Keuangan, “*Ruang Lingkup Lelang Dan Permasalahan Dalam  
Penegakan Hukum*”.

[www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), diakses pada 22 Oktober 2023

**Putusan :**

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Putusan  
Nomor 53/ Pdt.Sus/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.